TINJAUAN LITERATUR TERHADAP AKAD RAHN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH

Devi Novianty¹, Nur Aulia Husnihita Muchtar²,
Lince Bulutoding^{3,4}, Saiful Muchlis⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4}

Email: devinovianty148@gmail.com¹, husnihitaaulia@gmail.com²,
lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id³, saifulmuchlis@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

Akad Rahn merupakan instrumen pembiayaan syariah yang signifikan dalam sistem keuangan Islam, menawarkan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan menjaminkan aset berharga. Berbeda dengan pegadaian konvensional, Rahn beroperasi tanpa unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Pembentukan Pegadaian Syariah pada tahun 2003 merupakan respons terhadap kebutuhan pembiayaan syariah yang belum terakomodasi secara optimal oleh bank syariah karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan (fee ijarah) bukan bunga. Jika pinjaman dilunasi, barang dikembalikan; jika tidak, barang dapat dilelang untuk melunasi utang, dengan kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada nasabah. Proses ini memastikan pembiayaan sesuai prinsip syariah dan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Keunggulan akad Rahn meliputi bebas riba, jaminan keamanan bagi pemberi pinjaman, hak kepemilikan tetap bagi pemilik barang, akses pembiayaan yang mudah, serta mendorong prinsip ta'awun (saling tolong-menolong). Meskipun demikian, implementasinya menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan cabang dan sumber daya manusia, serta tantangan eksternal seperti persaingan dengan lembaga konvensional dan kurangnya literasi masyarakat. Penelitian terdahulu menegaskan efektivitas Rahn dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah mengakses pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah, serta kontribusinya terhadap sistem keuangan yang adil dan inklusif. Untuk pengembangan lebih lanjut, diperlukan peningkatan edukasi publik, pengawasan syariah yang ketat, dan inovasi produk.

Kata Kunci: Akad Rahn, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Instrumen Keuangan Islam.

Abstract

The Rahn contract is a significant sharia-compliant financing instrument in the Islamic financial system, offering an alternative for those in need of quick funds by pledging valuable assets. Unlike conventional pawnshops, Rahn operates without elements of usury (riba), gharar (uncertainty), and maysir (speculation). The establishment of Pegadaian Syariah in 2003 was a response to the need for sharia-compliant financing that had not been optimally accommodated by sharia banks due to limited resources and supporting facilities. Maintenance or storage fees (ijarah fees) are not interest. If the loan is repaid, the item is returned; if not,

the item can be auctioned to settle the debt, with the excess auction proceeds returned to the customer. This process ensures financing is in accordance with sharia principles and provides protection for both parties. The advantages of the Rahn contract include being free from usury, guaranteeing security for the lender, permanent ownership rights for the owner of the item, easy access to financing, and promoting the principle of ta'awun (mutual assistance). However, its implementation faces internal challenges such as limited branches and human resources, as well as external challenges such as competition from conventional institutions and low public literacy. Previous research confirms Rahn's effectiveness in helping low-income communities access financing without violating Sharia principles, as well as its contribution to a fair and inclusive financial system. Further development requires increased public education, strict Sharia supervision, and product innovation.

Keywords: *Rahn Contract, Sharia Financing, Sharia Pawnshops, Islamic Financial Instruments*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan sistem perbankan syariah ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan berbasis syariah serta beragam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara fundamental, lembaga keuangan syariah berbeda dari lembaga keuangan konvensional, baik dari segi otoritas, tujuan, cakupan operasional, cara kerja, maupun akuntabilitasnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem keuangan syariah. Tujuan utama dari lembaga keuangan syariah adalah mendukung tercapainya sasaran sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam.¹

Pegadaian merupakan salah satu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat dalam kondisi mendesak, terutama ketika mereka tidak memiliki simpanan tunai. Dalam situasi seperti itu, mencari pendanaan dari pihak ketiga menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan. Sementara layanan perbankan kerap kali memerlukan proses administrasi yang rumit dan syarat-syarat yang sulit dipenuhi, sebagian orang akhirnya memilih meminjam kepada rentenir meskipun bunga yang dikenakan cukup tinggi. Bagi mereka yang memiliki aset atau barang berharga yang dapat dijadikan jaminan, pegadaian menjadi pilihan yang lebih baik karena prosesnya lebih aman, legal, dan berada dalam naungan lembaga resmi.²

Pembentukan Pegadaian Syariah tidak hanya didasari oleh idealisme semata, tetapi juga dipicu oleh keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya seperti bank syariah, BPR syariah, BMT, dan asuransi syariah. Keberhasilan tersebut mendorong perhatian untuk mendirikan pegadaian syariah di bawah naungan lembaga tersendiri. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan akad Rahn sebagai salah satu produk bank syariah dinilai masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan komponen pendukung, seperti sumber daya

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: kencana, 2016).

² Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, 3rd edn (Ponorogo: CV Wade Group, 2017).

manusia yang memahami tafsir, peralatan penunjang, dan fasilitas penyimpanan barang jaminan. Akibatnya, bank belum mampu mengakomodasi kebutuhan akad Rahn, padahal produk ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di sisi lain, perkembangan pegadaian syariah juga terhambat karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal Rahn sebagai lembaga keuangan mandiri. Berdasarkan kondisi tersebut, pendirian Pegadaian Syariah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan, sehingga pada tahun 2003 dilakukanlah pendiriannya.³

B. Metode Penelitian

Artikel ini memakai pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode deskriptif, yakni penelitian yang mempelajari dengan intensif terkait referensi seperti jurnal, buku, artikel serta sumber kepustakaan yang lain yang terkait dengan pembahasan. Data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah dan artikel yang relevan, yang berfokus pada bagaimana kualitas pemimpin dan pencapaian visi misi organisasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi literatur yang ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memperoleh wawasan terkait tren dan temuan terbaru dalam judul yang akan di bahas.

C. Hasil dan Pembahasan

Rahn adalah akad penyerahan barang sebagai jaminan atas utang, di mana barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai jaminan sampai utang dilunasi oleh peminjam. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, rahn digunakan sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).⁴

Mekanisme implementasi rahn di lembaga keuangan syariah dimulai ketika nasabah (rahin) mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, seperti emas, perhiasan, atau kendaraan, beserta identitas diri seperti KTP.⁵ Barang jaminan tersebut kemudian dinilai oleh petugas untuk menentukan nilai pinjaman yang dapat diberikan. Setelah proses penilaian selesai, dilakukan penandatanganan akad rahn antara nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah (murtahin), yang berisi kesepakatan mengenai nilai pinjaman, jangka waktu, serta biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang (fee ijarah), bukan bunga.⁶ Dana pinjaman kemudian dicairkan kepada nasabah, dan nasabah menerima surat bukti rahn sebagai tanda kepemilikan barang jaminan yang sah.⁷

Selama masa pinjaman, barang jaminan disimpan dan dirawat oleh lembaga keuangan syariah, yang berhak mengenakan biaya sewa tempat penyimpanan sesuai kesepakatan. Jika nasabah melunasi pinjaman beserta biaya yang disepakati

³ Mohammad Ghozali Luluk Wahyu Roficoh, 'Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2018).

⁴ Surepno Surepno, 'Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 174 <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>.

⁵ Supriyadi, 'Implementasi Akad Rahn (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep)', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1.1 (2021), 1–20.

⁶ Surepno.

⁷ Supriyadi.

sebelum jatuh tempo, barang jaminan akan dikembalikan. Namun, apabila nasabah gagal melunasi pinjaman, lembaga keuangan syariah berhak melelang barang jaminan tersebut, dan hasil lelang digunakan untuk melunasi utang, sementara kelebihanannya dikembalikan kepada nasabah.⁸ Seluruh proses ini harus memenuhi rukun dan syarat sah rahn, yaitu adanya pelaku (rahin dan murtahin), objek akad (marhun dan marhun bih), serta ijab kabul dari kedua pihak. Mekanisme ini memastikan bahwa pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah, tanpa unsur riba, gharar, atau maysir, serta memberikan perlindungan baik bagi pemberi maupun penerima pinjaman.⁹

Akad rahn memiliki berbagai kelebihan yang menjadikannya instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pertama, akad rahn bebas dari riba karena tidak mengenakan bunga, melainkan hanya biaya penitipan dan pemeliharaan barang jaminan yang sifatnya tetap dan tidak berlipat ganda, sehingga lebih adil dan tidak memberatkan nasabah dibandingkan pegadaian konvensional.¹⁰ Kedua, akad ini memberikan jaminan keamanan bagi pemberi pinjaman (murtahin) karena barang jaminan (marhun) disimpan dan dapat ditahan hingga utang dilunasi, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan tanpa menghilangkan hak pemilik barang (rahin). Ketiga, pemilik barang tetap memiliki hak atas barang yang digadaikan dan dapat memanfaatkannya selama masa akad, sehingga hak kepemilikan tetap terjaga dan tidak langsung berpindah kepemilikan. Keempat, akad rahn memudahkan akses pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki aset berharga tanpa harus melalui prosedur yang rumit, karena barang jaminan menjadi modal utama dalam mendapatkan pembiayaan. Selain itu, akad rahn juga mendorong prinsip ta'awun (saling tolong-menolong) dalam masyarakat dan mengedepankan transparansi serta keadilan dalam transaksi keuangan.¹¹ Dengan memenuhi rukun dan syarat yang jelas menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad rahn memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.¹² Oleh karena itu, akad rahn menjadi solusi pembiayaan yang halal, aman, dan efisien dalam perbankan syariah maupun lembaga keuangan lainnya.

Akad rahn sebagai instrumen pembiayaan syariah menghadapi berbagai tantangan dan kritik yang perlu diperhatikan untuk pengembangannya. Secara internal, keterbatasan cabang pegadaian syariah, kurangnya tenaga profesional yang memahami prinsip syariah secara mendalam, serta karyawan yang sering

⁸ Supriyadi.

⁹ Muhammad Wifqi Hidayatullah and others, 'Implementasi Akad Rahn Di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2.1 (2024), 81–90 <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>.

¹⁰ Meirani Rukmanda, 'Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2020), 3.

¹¹ Vemmy Mayditri, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagai Berkah Samarinda)', *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10.2 (2022), 422–40.

¹² Neni Hardiati, Fitriani, and Wahyu Nugroho, 'Pendapat Ulama Tentang Implementasi Akad Qard Dan Akad Rahn Dalam Perekonomian Islam', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1. July (2024), 413–19.

kali merangkap tugas menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan akad rahn. Selain itu, biaya administrasi dan jasa pemeliharaan barang jaminan yang terkadang dihitung berdasarkan persentase pembiayaan dianggap memberatkan nasabah, sehingga menimbulkan beban ekonomi yang tidak ringan meskipun akad rahn berupaya menghindari riba. Faktor eksternal juga turut memengaruhi, seperti persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang mulai masuk ke bisnis rahn, kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat terhadap akad rahn, serta adanya stigma bahwa rahn terkait dengan fanatisme agama.

Ancaman keamanan seperti perampokan terhadap barang jaminan juga menjadi perhatian serius. Selain itu, akad rahn belum populer di masyarakat luas, sehingga pemanfaatannya masih terbatas. Dalam konteks fiqih muamalat, pengawasan ketat dari lembaga pengawas syariah sangat diperlukan agar pelaksanaan akad rahn tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak, terutama nasabah yang biasanya berada dalam posisi lebih lemah. Kritik lain juga muncul terkait transparansi dalam penentuan nilai barang agunan dan biaya tambahan yang dikenakan, yang kadang menimbulkan ketidakadilan dalam praktiknya.¹³ Oleh karena itu, peningkatan edukasi publik, pengawasan syariah yang lebih ketat, serta inovasi produk dan layanan menjadi solusi penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat peran akad rahn dalam inklusi keuangan syariah.

Beberapa studi penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akad arah efektif dalam system pembiayaan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh¹⁴ mengungkapkan bahwa akad rahn terbukti membantu masyarakat, terutama berpenghasilan rendah, dalam mengakses pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah. Akad ini memberikan fleksibilitas jangka waktu pelunasan dan perlindungan terhadap risiko kehilangan barang berharga yang digadaikan, serta berkontribusi pada sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif sesuai maqashid syariah.

Studi lain pada BMT UGT Nusantara KCP Pagak Malang juga menegaskan bahwa implementasi akad Rahn Tasjily sesuai dengan ketentuan syariah dan efektif dalam meningkatkan akses permodalan masyarakat. Meski demikian, diperlukan peningkatan literasi keuangan dan optimalisasi layanan agar produk ini dapat lebih menjangkau dan dimanfaatkan secara maksimal oleh anggota masyarakat.¹⁵

D. Penutup

Akad Rahn merupakan instrumen pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang menawarkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan menjaminkan barang berharga. Berbeda dengan pegadaian konvensional, Rahn berlandaskan prinsip syariah, sehingga bebas dari unsur riba, gharar

¹³ Muhammad Komarudin and Muhammad Annas, 'Pembiayaan Aqad Rahn Di Tinjau Dari Fiqih Muamalat', *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4.1 (2024), 1962-74 <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5733>.

¹⁴ Muhammad Komarudin and Muhammad Annas.

¹⁵ Anisa Nurul Hidayah and Muhammad Romli Muar, 'Analisis Efektivitas Pembiayaan Dan Implementasi Akad', 2 (2025).

(ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Keberadaan Pegadaian Syariah, yang didirikan pada tahun 2003, menjadi respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pembiayaan syariah dan keterbatasan bank syariah dalam mengakomodasi akad Rahn secara optimal.

Mekanisme akad Rahn melibatkan penyerahan barang jaminan (marhun) oleh nasabah (rahin) kepada lembaga keuangan syariah (murtahin) sebagai pengikat utang. Setelah penilaian, pinjaman dicairkan dan nasabah dikenakan biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang (fee ijarah), bukan bunga. Jika pinjaman dilunasi, barang dikembalikan; jika tidak, barang dapat dilelang untuk melunasi utang, dengan kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada nasabah. Proses ini memastikan pembiayaan sesuai prinsip syariah dan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, akad Rahn menghadapi berbagai tantangan. Secara internal, keterbatasan cabang, kurangnya tenaga profesional syariah, dan biaya administrasi yang kadang memberatkan nasabah menjadi hambatan. Faktor eksternal meliputi persaingan dengan lembaga konvensional, kurangnya literasi masyarakat, stigma agama, dan risiko keamanan barang jaminan. Selain itu, pengawasan ketat dari lembaga syariah dan transparansi dalam penentuan nilai agunan serta biaya tambahan menjadi krusial untuk mencegah ketidakadilan.

Untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat peran akad Rahn dalam inklusi keuangan syariah, diperlukan peningkatan edukasi publik, pengawasan syariah yang lebih ketat, serta inovasi produk dan layanan. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas akad Rahn dalam membantu masyarakat, terutama berpenghasilan rendah, mengakses pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah, serta berkontribusi pada sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif sesuai maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiati, Neni, Fitriani, and Wahyu Nugroho, 'Pendapat Ulama Tentang Implementasi Akad Qard Dan Akad Rahn Dalam Perekonomian Islam', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.July (2024), 413–19
- Hidayah, Anisa Nurul, and Muhammad Romli Muar, 'Analisis Efektivitas Pembiayaan Dan Implementasi Akad', 2 (2025)
- Luluk Wahyu Roficoh, Mohammad Ghozali, 'Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2018)
- Mayditri, Vemmy, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)', *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10.2 (2022), 422–40
- Muhammad Komarudin, and Muhammad Annas, 'Pembiayaan Aqad Rahn Di Tinjau Dari Fiqih Muamalat', *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4.1 (2024), 1962–74
<<https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5733>>
- Muhammad Wifqi Hidayatullah, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, and Muhammad Taufiq Abadi, 'Implementasi Akad Rahn Di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2.1 (2024), 81–90 <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>
- Purnomo, Rochmat Aldy, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, 3rd edn (Ponorogo: CV Wade Group, 2017)
- Rukmanda, Meirani, 'Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2020), 3
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (jakarta: kencana, 2016)
- Supriyadi, 'Implementasi Akad Rahn (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep)', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1.1 (2021), 1–20
- Surepno, Surepno, 'Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 174 <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>